

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI KOTA LAMA SEMARANG DALAM MENDUKUNG PARIWISATA BERKELANJUTAN

Yosua Byantika, Lusia Astrika
Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang merupakan kebijakan pemerintah untuk melestarikan kawasan bersejarah sekaligus mengembangkan sektor pariwisata secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi pemerintah, pengelola kawasan, pelaku UMKM, dan wisatawan. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang berjalan cukup baik, terutama dalam komunikasi antar lembaga dan dukungan pelaksana kebijakan. Revitalisasi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, pelestarian nilai sejarah dan budaya, serta perbaikan kualitas lingkungan kawasan wisata. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal yang belum optimal, serta tantangan pengelolaan lingkungan seperti sampah dan kepadatan pengunjung. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, pengelola kawasan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan di kawasan Kota Lama Semarang.

Kata kunci: implementasi kebijakan, revitalisasi kawasan, pariwisata berkelanjutan, Kota Lama Semarang

ABSTRACT

The revitalization of the Kota Lama Semarang area is a government policy aimed at preserving historical heritage while promoting sustainable tourism development by considering economic, socio-cultural, and environmental aspects. This study aims to analyze the implementation of the revitalization policy of Kota Lama Semarang in supporting sustainable tourism. The research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, involving informants selected through purposive sampling, including government officials, area managers, local business actors, and tourists. The analysis applies the policy implementation framework developed by George C. Edwards III, which includes the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The results show that the implementation of the revitalization policy has generally been carried out well, particularly in terms of inter-agency communication and the commitment of policy implementers. The revitalization has also contributed to increasing economic activities, preserving the historical and cultural values of the area, and improving the environmental quality of the tourism destination. However, several challenges remain, such as limited community participation, suboptimal empowerment of local economic actors, and environmental management issues including waste management and visitor density. Therefore, stronger collaboration among government institutions, area managers, business actors, and the local community is needed to support sustainable tourism development in Kota Lama Semarang.

Keywords: *policy implementation, urban revitalization, sustainable tourism, Kota Lama Semarang.*

PENDAHULUAN

Revitalisasi kawasan bersejarah menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata berbasis pelestarian budaya dan keberlanjutan. Kota Lama Semarang sebagai kawasan cagar budaya memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan, namun dalam perkembangannya mengalami degradasi fungsi yang ditandai dengan terbengkalainya bangunan bersejarah, keterbatasan infrastruktur, serta munculnya berbagai permasalahan sosial dan lingkungan. Kota Lama merupakan kawasan dengan bangunan

berarsitektur kolonial yang memiliki nilai sejarah tinggi dan ditetapkan sebagai cagar budaya karena memenuhi kriteria usia dan nilai historisnya (Kojongian dkk., 2017; Murtomo, 2008; Hartati, 2020). Namun, seiring perkembangan zaman kawasan ini mengalami penurunan fungsi hingga menjadi kawasan yang terbengkalai (Trancik, 1986). Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan revitalisasi guna mengembalikan fungsi kawasan sekaligus mengembangkan potensi pariwisata secara berkelanjutan.

Revitalisasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penataan fisik, tetapi juga mencakup pengelolaan kawasan, pelestarian nilai budaya, serta keterlibatan berbagai aktor dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan revitalisasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, belum optimalnya pemberdayaan ekonomi lokal, serta permasalahan lingkungan seperti pengelolaan sampah dan kepadatan pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang dalam mendukung pariwisata berkelanjutan serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Dalam menganalisis hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edwards III yang menekankan pada empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep pariwisata

berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan dalam pengembangan pariwisata.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa revitalisasi kawasan bersejarah umumnya berfokus pada aspek penataan fisik, city branding, serta peningkatan ekonomi lokal. Penelitian oleh Hayyumi Noor (2018) menunjukkan bahwa revitalisasi tidak hanya berfokus pada fungsi, tetapi juga aspek simbolis budaya. Sementara itu, Natalia Citra Bintang Timur (2020) menekankan bahwa revitalisasi mampu memperkuat identitas kota dan meningkatkan ekonomi lokal. Di sisi lain, Putri, Cahyaningrum (2019) menunjukkan bahwa pengembangan wisata berbasis masyarakat mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan pendampingan. Selain itu, penelitian Putra, Yosafat Krisatya Herdyanto (2024) menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengembangan pariwisata berbasis warisan budaya.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung berfokus pada hasil revitalisasi dan belum banyak mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan dijalankan oleh para

aktor yang terlibat serta keterkaitannya dengan prinsip pariwisata berkelanjutan secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan mengkaji revitalisasi Kota Lama Semarang dari perspektif implementasi kebijakan secara menyeluruh serta mengaitkannya dengan capaian pariwisata berkelanjutan, sehingga tidak hanya melihat perubahan fisik kawasan, tetapi juga proses, aktor, dan dampak kebijakan secara lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis implementasi kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan, keterlibatan aktor, serta dinamika yang terjadi di lapangan, bukan untuk mengukur hubungan antar variabel secara kuantitatif. Studi kasus digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena revitalisasi Kota Lama sebagai objek yang memiliki karakteristik spesifik dan kontekstual.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam kebijakan revitalisasi. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak pemerintah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, pengelola kawasan yang tergabung dalam Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL), pelaku usaha atau UMKM, petugas kebersihan, serta pengunjung kawasan Kota Lama. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang yang dianggap telah mewakili berbagai perspektif dalam implementasi kebijakan. Penentuan jumlah informan dilakukan hingga mencapai titik kejenuhan data (data saturation), yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan dan mendalam terkait implementasi kebijakan dari berbagai perspektif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait proses implementasi

kebijakan, peran aktor, serta kendala yang dihadapi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kawasan, aktivitas wisata, serta interaksi antar pelaku di lapangan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan resmi, kebijakan pemerintah, serta data pendukung lainnya. Instrumen penelitian dalam studi ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama, yang didukung oleh pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator teori implementasi kebijakan dan konsep pariwisata berkelanjutan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antar temuan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dengan mengacu pada kerangka teori implementasi kebijakan dan prinsip pariwisata berkelanjutan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan

metode, serta uji kredibilitas melalui proses member check guna memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan kondisi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan: Perspektif George C. Edwards III

a. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum berjalan optimal karena sosialisasi tidak merata dan masih bersifat top-down. Sebagian pelaku usaha dan pengunjung belum memahami tujuan kebijakan secara utuh, sehingga partisipasi dalam mendukung implementasi masih terbatas. Temuan ini sejalan dengan (Putri & Cahyaningrum, 2019), namun penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan utama terletak pada distribusi informasi yang tidak merata, bukan sekadar rendahnya partisipasi.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas yang memadai. Perbaikan infrastruktur kawasan seperti pedestrian dan ruang publik menunjukkan adanya peningkatan kualitas kawasan yang mendukung aktivitas pariwisata. Temuan ini mendukung (Sulistiyadi dkk., 2017) yang

menekankan pentingnya kesiapan sumber daya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan.

c. Disposisi

Pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung revitalisasi kawasan. Tidak ditemukan hambatan signifikan terkait sikap pelaksana, sehingga implementasi berjalan sesuai dengan arah kebijakan. Hal ini memperkuat teori Edwards III (1980) bahwa disposisi pelaksana merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Koordinasi antar aktor berjalan dengan baik dan didukung oleh pembagian kewenangan yang jelas. Hal ini memungkinkan implementasi kebijakan berjalan secara terintegrasi. Temuan ini sejalan dengan (Putra, 2024) yang menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan wisata.

2. Capaian Prinsip Pariwisata Berkelanjutan

a. Ekonomi

Revitalisasi kawasan mendorong peningkatan aktivitas wisata dan usaha, namun manfaat ekonomi yang dihasilkan belum sepenuhnya merata, khususnya bagi pelaku usaha kecil. Kondisi ini menunjukkan

bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih bersifat terbatas dan belum inklusif.

b. Sosial-Budaya

Revitalisasi kawasan mampu menjaga karakter kawasan sebagai warisan budaya serta mendorong berkembangnya aktivitas berbasis heritage. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial-budaya telah berjalan optimal dalam mendukung identitas kawasan.

c. Lingkungan

Terdapat perbaikan infrastruktur kawasan yang mendukung kenyamanan pengunjung, namun peningkatan aktivitas wisata juga menimbulkan tekanan terhadap pengelolaan kebersihan dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek lingkungan telah mengalami perbaikan, tetapi masih memerlukan penguatan untuk mencapai keberlanjutan yang optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi kawasan telah mampu mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan, namun masih bersifat parsial.

Meskipun demikian, optimalitas pada dimensi implementasi lainnya masih bersifat relatif dan berpotensi dipengaruhi oleh dinamika implementasi di lapangan. Dengan demikian, komunikasi kebijakan menjadi faktor determinan dalam mempengaruhi

optimalisasi capaian keberlanjutan secara menyeluruh.

Tabel 1 Hasil Matriks Hasil Penelitian

Aspek	Temuan Penelitian	Status	Implikasi
Komunikasi	Sosialisasi belum merata dan cenderung top-down	Belum optimal	Partisipasi masyarakat terbatas
Sumber Daya	SDM, anggaran, dan fasilitas tersedia	Optimal	Mendukung pengelolaan kawasan
Disposisi	Komitmen pelaksana kuat dan konsisten	Optimal	Implementasi berjalan efektif
Struktur Birokrasi	Koordinasi antar aktor berjalan baik	Optimal	Kebijakan terintegrasi
Ekonomi	Aktivitas wisata dan usaha meningkat	Mendukung	Dampak ekonomi positif
Sosial-Budaya	Karakter heritage tetap terjaga	Mendukung	Identitas kawasan kuat
Lingkungan	Infrastruktur membaik, pengelolaan berjalan	Mendukung	Keberlanjutan cukup terjaga

Sumber : Diolah penulis, 2026

Berdasarkan tabel matriks tersebut, terlihat bahwa dimensi implementasi

kebijakan didominasi oleh capaian yang optimal, kecuali pada aspek komunikasi. Sementara itu, pada dimensi pariwisata berkelanjutan, capaian menunjukkan ketidakseimbangan, di mana aspek sosial-budaya relatif kuat, sedangkan aspek ekonomi dan lingkungan masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak secara otomatis menghasilkan keberlanjutan yang seimbang.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan revitalisasi kawasan berbasis warisan budaya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan pada dasarnya telah mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, menjaga keberlanjutan sosial-budaya, serta memperbaiki kualitas lingkungan kawasan. Namun demikian, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan manfaat ekonomi, sehingga menunjukkan bahwa pertumbuhan yang dihasilkan masih bersifat terbatas dan belum inklusif bagi seluruh pelaku yang terlibat.

Di sisi lain, temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi kebijakan menjadi determinan utama dalam keberhasilan implementasi. Ketidakmerataan distribusi informasi serta rendahnya pelibatan

aktor dalam proses kebijakan menyebabkan terbatasnya partisipasi, yang pada akhirnya mempengaruhi optimalisasi hasil kebijakan secara keseluruhan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur kelembagaan, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi yang mampu menjembatani hubungan antara kebijakan dan aktor pelaksana.

Dengan demikian, secara konseptual dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi dalam konteks pariwisata berkelanjutan cenderung menghasilkan capaian yang bersifat parsial apabila tidak didukung oleh sistem komunikasi yang inklusif dan partisipatif. Temuan ini memperkuat bahwa keberlanjutan tidak hanya bergantung pada hasil kebijakan, tetapi juga pada proses implementasi yang mampu memastikan keterlibatan aktor serta pemerataan manfaat secara berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam penguatan implementasi kebijakan revitalisasi kawasan

berbasis pariwisata berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan model tata kelola kawasan berbasis *collaborative governance* perlu dilakukan melalui mekanisme koordinasi yang inklusif dan berkelanjutan antar pemangku kepentingan, sehingga mampu meningkatkan sinergi dalam proses pengelolaan kawasan wisata.
- 2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan akses pasar, serta dukungan terhadap sumber pembiayaan, guna mendorong terciptanya distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata dan inklusif.
- 3) Pengelolaan kawasan perlu didukung oleh pengaturan aktivitas yang adaptif terhadap karakteristik ruang, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara fungsi ekonomi, ruang publik, dan pelestarian kawasan sebagai warisan budaya.
- 4) Pengembangan pariwisata berbasis edukasi perlu diperkuat sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran terhadap nilai sejarah dan budaya, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Bima Bayu Aji, A. S. (n.d.). IMPLEMENTASI PROGRAM REVITALISASI DI KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG. Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 1– 16.
- Centre, W. H. (2012). Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention UNITED. In *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention* (Issue July).
- Dewantara, G. A. H., & Astuti, P. (2017). Kajian Implementasi Program Revitalisasi Kawasan Kota Lama Sebagai Kawasan Pariwisata. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 1–10.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Laporan Akhir Analisis Pasar Wisata Kota Semarang Tahun 2023. Semarang. Oktober 2023.
- Firdausyah, A. G., & Dewi, S. P. (2021). Pengaruh revitalisasi terhadap pola ruang kota lama Semarang. *Jurnal Riptek*, 15(1), 17-27.
- Harsono, I., Demung, I. W., Judijanto, L., Sari, H. P. R., & Ananti, D. D. (2025). *Pariwisata Berkelanjutan: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hartati, U. (2020). Cagar budaya sebagai sumber belajar sejarah lokal. *Diakronika*, 20(2), 143-151.
- Hayyumi Noor (2018). Revitalisasi Desain Interior Gedung Kesenian Sobokartti Di Semarang. Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Surakarta.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas. 26 Juli 2024.
- Mangihut, gu E., Mangihut, T. E., & , Parfi Khadiyanto², P. K. (2014). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG PENDAHULUAN. Partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian warisan budaya merupakan salah satu prioritas yang harus tercapai dalam setiap kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya yang berw.2(2), 4–10
- Mochammad Akbar Yanuarsyad (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Tentang Revitalisasi Kota Lama Semarang Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Sektor Pariwisata. Universitas Negeri Semarang.
- Natalia Citra Bintang Timur (2020). Revitalisasi Kawasan Kota Lama sebagai Upaya City Branding di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 9, no. 01, hal 101-110.

Putra, Yosafat Krisatya Herdyanto (2024). Strategi Pengembangan Pariwisata Warisan Budaya Pada Puro Mangkunegaran Solo. Universtas Atma Jaya Yogyakarta

Putri, Cahyaningrum (2019). Pengembangan Wisata Kampung Pelangi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Semarang. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Safitri, A., & Wijayati, P. A. (2024). The Dynamics of Lawang Sewu: As a

Railway Museum 2011-2023. *Journal of Indonesian History*, 12(2), 65-79.

Sulistiyadi, Y., Eddyono, F., & Hasibuan, B. (2017). *Pariwisata berkelanjutan: Pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat*. Anugrah Utama Raharja.